

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ditandatangani *Treaty on European Union* atau Perjanjian Penyatuan Eropa yang dikenal dengan Perjanjian Maastricht pada tahun 1992, memantapkan langkah negara-negara di kawasan benua Eropa tersebut untuk bersatu setelah berabad-abad terkungkung dalam perselisihan, dalam satu wadah yaitu Uni Eropa. Ini menjadikannya suatu fenomena yang sangat menarik. Bukan saja tentang perkembangannya yang pesat, tetapi juga dampak-dampak yang ditimbulkan dari terbentuknya Uni Eropa tersebut.

Sejak tahun 1949 Negara Jerman (Barat) sebagai salah satu pelopor berdirinya Uni Eropa berusaha meraih kepercayaan Eropa dengan ikut berperan secara proaktif dalam segala hal yang menyangkut perkembangan Uni Eropa. Jerman selalu berupaya menghapus kekhawatiran negara-negara Eropa lainnya bahwa Jerman akan mencoba kembali untuk menguasai Eropa seperti pada masa-masa sebelumnya.

Hingga pada saat ide-ide reunifikasi menghinggapi rakyat Jerman Barat dan Timur untuk bersatu kembali pada tahun 1989 dalam satu wadah Republik Federal Jerman, hal ini semakin menguatkan posisi Jerman di Eropa, khususnya di Uni Eropa.

Dampak-dampak yang timbul dan mulai menguatnya posisi Jerman pada bidang politik di Uni Eropa dan permasalahan inilah yang akan di kaji lebih lanjut dan kemudian penulis memutuskan “Potensi Dominasi Jerman pada Bidang Politik di Uni Eropa Setelah Reunifikasi” sebagai judul dari skripsi ini.

B. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang faktor-faktor apa saja yang dapat membuat bangsa-bangsa di Eropa tersebut mau bergabung di dalam Uni Eropa serta peran Jerman sendiri setelah reunifikasi dengan dampak-dampaknya yang ditimbulkannya bagi perkembangan Uni Eropa itu sendiri.

Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan program S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga dapat dijadikan bahan bacaan bagi mereka yang ingin mengetahui perkembangan dari penyatuan Jerman dan dampak-dampaknya bagi perkembangan Uni Eropa itu sendiri.

C. Latar Belakang Masalah

Reunifikasi Jerman pada tanggal 3 Oktober 1990 menandakan adanya satu perubahan yang signifikan di peta geopolitik benua Eropa. Negara Jerman yang tadinya dibagi menjadi dua bagian yakni Jerman Barat dan Jerman Timur, telah berubah dari negara yang terkungkung di antara konfrontasi Amerika Serikat dan Uni Soviet di Perang Dingin, menjadi satu negara besar lagi yang berada di jantung Eropa.

Perang Dunia I berakhir dengan adanya Persetujuan *Versailles* yang ditandatangani tanggal 28 Juni 1919, delapan bulan setelah perang berakhir. Persetujuan ini amat menghukum Jerman, yang selanjutnya dilarang untuk mengembangkan angkatan bersenjata hingga cukup besar untuk mengancam lagi perdamaian Eropa. Selain pembatasan militer tersebut, Jerman juga harus membayar ganti rugi kepada negara-negara Sekutu pemenang perang yang jumlahnya tidaklah

kecil. Sayangnya Persetujuan *Versailles* ini tidak peka dan tidak bisa dijalankan. Selain itu, dengan dibubarkannya Imperium Hapsbrug Austro-Hungaria, Imperium yang tidak pernah kuat tapi besar ini membuat Jerman yang kalah masih tetap sebagai negara yang secara ekonomi dan militer paling kuat di Eropa Tengah. Tetapi perancang perdamaian di Versailles punya keyakinan bahwa kali ini Jerman akan ditaklukkan selamanya. Perancis yang sebelumnya pernah diserbu Jerman tahun 1870 dan tahun 1914 yakin takkan pernah diancam Jerman lagi dan Inggris pun sepakat dalam hal ini. Perang Dunia I ini tidak berakhir dengan menyerahnya Jerman yang kalah. Ia berakhir dengan satu penghentian tembak-menembak (*armistice*) di mana kekuatan Jerman, yang tidak mampu lagi melanjutkan perang, masih tetap utuh sebagai satu kekuatan militer. Jerman yang merasa tidak dikalahkan itu merasa dikhianati oleh Persetujuan *Versailles*, mereka memendam geram terhadap para perunding Jerman di Versailles. Babakan ini harus diakui memberi salah satu ladang subur bagi tampilnya Hitler di panggung kekuasaan.

Hitler tampil dengan dukungan partainya yaitu *National Socialist* (Nazi) yang semakin kuat seiring dengan tingkat inflasi yang meroket di Jerman. Suatu saat Presiden Hindenburg memberi kesempatan pada Hitler untuk menjadi Kanselir pada tahun 1933 dan ketika Hindenburg meninggal pada tahun 1934, Hitler lalu merangkap jabatan Presiden dan Kanselir, dan menyebutnya dirinya *Fuehrer* (Pemimpin) bangsa Jerman.¹ Hitler pun terus membangun kekuatan militernya dan menganeksasi Austria dan Cekoslowakia untuk dimasukkan kedalam wilayah *Reich* Jerman. Semuanya lalu menjadi lapang bagi Hitler untuk memulai rencana besarnya yang di formalkan dalam serbuan ke Polandia pada awal September 1939, yang juga sebagai tanda pecahnya Perang Dunia II.

¹ Ojong, P.K, *Perang Eropa*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hal.xxviii.

Dengan strategi *Blitzkrieg* atau perang kilat, Jerman dapat menguasai Polandia hanya dalam waktu 17 hari. Pada tanggal 9 April 1940. Hitler menyerbu ke Denmark, yang menyerah tanpa bertempur.² Norwegia kemudian menjadi sasaran selanjutnya namun Norwegia memberikan perlawanan yang dibantu oleh pasukan pendaratan Inggris,, namun pada permulaan Mei, Norwegia dapat di kuasai juga. Sebulan kemudian dengan kombinasi serangan udara dan darat, Belanda, Belgia dan Luksemburg juga dapat dikuasai oleh Jerman. Dan pada akhirnya Perancis juga dapat dikuasai oleh Jerman, sangat mengejutkan memang karena Eropa sangat mengharapkan Perancis dapat mengalahkan Jerman sebab Perancis memiliki tentara terbesar di Eropa saat itu, namun dengan kelihaihan taktik para Jendral Hitler, Perancis pun dapat ditaklukkan. Inggris pun tidak ketinggalan untuk dijadikan sasaran selanjutnya bagi Hitler, karena dengan menguasai Inggris maka armada Angkatan Lautnya akan semakin besar dan kuat. Namun usaha Hitler ini gagal berkat perjuangan rakyat Inggris yang gagah berani mempertahankan tanah airnya. Begitu juga dengan Rusia, keinginan Hilter untuk menaklukkan negara ini tidaklah semudah yang diinginkan, faktor cuaca, geografis, dan keegoisan Hitler sendirilah yang menyebabkan Rusia tidak bisa dikuasai juga.

Kegagalan tersebut rupanya mempengaruhi ke dalam semangat para serdadu Jerman yang mulai jenuh dan kelelahan bahkan kelaparan dalam menjaga daerah aneksasi Jerman dari ancaman Inggris dan Amerika Serikat. Pada tanggal 6 Juni 1944 tentara-tentara sekutu mendarat di Pantai Normandia untuk menyerang Jerman. Pertahanan Jerman yang kuat mengharuskan sekutu menambah jumlah pasukan untuk memberikan tekanan agar tentara-tentara Jerman dapat dikalahkan. Dan akhirnya pada awal September 1944 itu, Perancis pun terbebas dari pendudukan Nazi Jerman. Pada

² *Ibid*, hal. 26.

bulan Desember, Jerman melancarkan serangan balasan terakhirnya, sekutu pada mulanya kewalahan namun pada akhirnya Jerman dapat dipukul mundur dan Jerman pun menyerah tanpa syarat pada tanggal 9 Mei 1945.

Kekalahan Jerman menyebabkan Jerman harus kehilangan kedaulatannya. Jerman harus rela melihat negaranya siap di bagi-bagi seperti potongan kue oleh pihak sekutu yaitu Uni Soviet, Amerika, Inggris dan Perancis. Usaha-usaha yang dilakukan oleh negara-negara sekutu tersebut telah melalui berbagai macam tahapan konferensi yaitu dari konferensi Teheran sampai Konferensi Postdam yang mengalami kebuntuan sehingga di antara sekutu gagal mencapai kesepakatan.

Kegagalan *Postdam Agreement* inilah yang menyebabkan Jerman terpecah menjadi dua bagian yaitu Republik Federal Jerman (RFJ) atau Jerman Barat yang dikuasai Amerika, Inggris, Perancis dan Republik Demokratik Jerman (RDJ) atau Jerman Timur di kuasai oleh Uni Soviet.

Republik Federal Jerman atau Jerman Barat terbentuk pada tanggal 23 Mei 1949 atas prakarsa Amerika Serikat, Inggris dan Perancis untuk membendung pengaruh komunis Uni Soviet di Eropa dan membangun Jerman Barat itu sendiri dari keterpurukan akibat perang. Untuk itu diperlukan seorang pemimpin konservatif dan juga modern, yang bisa menjadi perantara berbagai kepentingan kelompok moderat dan konservatif serta bersih dari segala yang berhubungan dengan Nazi.³ Pilihan yang paling cocok saat itu adalah Konrad Adeneur, mantan walikota Cologne pada masa pemerintahan Republik Weimar. Dia di bantu oleh Prof. Dr. Ludwig Erhard sebagai menteri ekonomi saat itu, memformulasikan kebijakan-kebijakan agar ekonomi di Jerman Barat ini dapat bangkit seperti semula atau bahkan lebih baik. Langkah-langkah restrukturisasi pun dapat dilaksanakan dengan lancar oleh karena adanya

³ Allen, Christopher. S, *European Politics in Transition*, D.C. Heath Company, p. 288.

bantuan material dan finansial dari negara-negara Barat yang mengharapkan supaya keadaan ekonomi Jerman Barat segera pulih sehingga nantinya tidak akan menjadi beban bagi negara-negara di Eropa Barat di masa depan.

Dan dalam waktu enam bulan saja, ekonomi RFJ mengalami peningkatan dari 50% menjadi 70%, kebijakan atas ekonomi dan penggunaan mata uang baru sudah bisa dilakukan. Program-program lain di rancang untuk membantu proses pembangunan ekonomi. Nilai perdagangan negeri yang fantastis dan semakin derasnya investasi yang mengalir menyebabkan pertumbuhan ekonomi RFJ meningkat pesat. RFJ menjelma menjadi suatu kekuatan baru di Eropa Barat dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya.

Jerman Timur atau *German Democratic of Republic* berdiri pada tanggal 7 Oktober 1949, sebagai akibat pembagian daerah pendudukan setelah Perang Dunia II, *German Democratic Republic (GDR)* atau Jerman Timur adalah salah satu negara satelit Uni Soviet yang berhaluan komunis seperti negara-negara Eropa Timur lainnya. Tidak seperti Federal Republic of Germany atau Jerman Barat, Jerman Timur tidak mendapat bantuan ekonomi dari partner seniornya itu tapi malah dipaksa untuk membantu Uni Soviet menutupi segala biaya kerusakan yang diakibatkan oleh perang dan penyaluran paksa sumber-sumber daya untuk industri Uni Soviet.⁴ Beberapa pengamat di Barat menjuluki Jerman Timur sebagai “negara yang seharusnya tak ada”, rasa sentimen ini mungkin berasal dari para penduduk Jerman Timur yang rindu akan suatu negara Jerman yang makmur dan bersatu.

Negara Jerman Timur mengambil bentuk Demokrasi Sosialis Pluralis sebagai bentuk pemerintahannya dengan seorang Presiden sebagai kepala negara dan seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Walter Ulbricht berperan penting

⁴ *Ibid*, p.685

dalam perkembangan Jerman Timur di tahun-tahun awal berdirinya negara ini. Ia adalah Sekjen SED, dan penganut garis keras komunis yang kaku dan berideologi Marxisme-Leninisme. Partai Komunis memegang kuasa dalam penentuan kebijakan Jerman Timur dan dalam sistem politiknya. Dalam melaksanakan kebijakan ini pemerintahan Jerman Timur selalu mencari dukungan dari Uni Soviet agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan semestinya.

Jerman Timur juga telah membuktikan sebagai salah satu negara yang mempunyai kebijakan ketat di Eropa Timur yaitu dengan adanya sensor secara ketat, kontrol para imigran yang dilakukan secara keras dan seksama serta pemisahan antara penduduk Jerman Barat dan Timur yang sangat mengecilkan hati kedua belah pihak. Ini dibuktikan dengan adanya 'Tembok Berlin' yang memisahkan wilayah Jerman Barat dan Jerman Timur. Tembok ini dibangun agar warga Jerman Timur tidak kabur ke Jerman Barat yang mempunyai ekonomi yang lebih baik.

Keberhasilan Jerman Barat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat menjadikan suatu kekhawatiran bagi negara-negara Eropa lainnya. Mereka takut dengan pertumbuhan yang pesat tersebut, Jerman akan mencoba kembali menguasai Eropa seperti pada masa-masa sebelumnya. Kekhawatiran ini di picu juga oleh adanya persaingan Jerman-Perancis dalam memperebutkan sumber-sumber daya batu bara dan baja. Pada bulan Mei 1950, Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schuman mengajukan rancangan untuk sebuah komunitas Baja dan Batubara Eropa yaitu ECSC (*European Coal and Steel Community*), rancangan tersebut di terima oleh enam negara yaitu Perancis, Italia, Belanda, Belgia, Luksemburg dan Jerman Barat, dan dilaksanakan pada tahun 1952. Satu hal terpenting yang sengaja ditekankan secara khusus oleh Schumann adalah interdependensi ekonomi Eropa akan menghilangkan unsur yang secara historis menjadi penyebab perang tersebut. Kaum

nasionalis di Perancis juga yakin, rancangan ini akan mengontrol industri Jerman karena sektor industri inilah yang dianggap bertanggung jawab atas berkuasanya Hitler. Tetapi bagi Jerman Barat sendiri keikutsertaanya dalam ECSC ini, khususnya kaum industrialis di sana, melihat suatu peluang yang sangat baik untuk dapat mengakhiri kontrol dari pemerintahan pendudukan di Jerman Barat sehingga mereka dapat menjalankan industri mereka tanpa ada campur tangan pemerintahan pendudukan lagi. *European Community* atau Masyarakat Eropa (ME) kemudian dibentuk sebagai hasil peleburan ECSC, *European Economic Community* (EEC) dan EURATOM pada tanggal 25 Maret 1957 dan mulai mengikat sejak tanggal 1 Januari 1958 dan semenjak itu bergerak secara perlahan-lahan dalam suatu integrasi ekonomi ke tujuan yang terarah. ME merupakan rumah bagi perekonomian Jerman dan Jerman tentu sangat menyokong keberadaan ME ini di Eropa. Jerman sangat membuka pasarnya untuk negara-negara Eropa dengan mengurangi bea pajak dan larangan dalam perdagangannya. Keringanan ini tentunya makin menarik negara-negara di ME untuk melakukan transaksi jual beli, dan dengan adanya ME ini Jerman dapat mencapai surplus pendapatan yang lebih daripada negara-negara Eropa lainnya. Saham Jerman Barat di ME sangatlah dominan yaitu lebih dari 25%, dan Jerman Barat juga menjadi investor terbesar di negara-negara ME lainnya yaitu mencapai 56.7 billionDM.⁵ Dengan tingkat ekonominya yang fantastis tersebut, Jerman Barat menjadi penyokong terbesar anggaran ME, dimana negara-negara lainnya hanya memberi kontribusi dana tidak lebih dari 20%.

Dengan adanya kemudahan yang diberikan Jerman untuk melakukan transaksi perdagangan juga menimbulkan efek timbal balik yaitu Jerman juga leluasa memasuki

⁵ lihat di <http://www.exploit.com/Germany-Chapter-6-International-Economic-Relation>

pasar-pasar ekonomi di Eropa. Dengan begitu, tujuan semula ME yaitu integrasi ekonomi, dapat di jalankan dengan mudah.

Jerman Barat sangat memegang peranan penting dalam usaha integrasi Eropa agar bangsa-bangsa Eropa tidak terlibat dalam permusuhan dan peperangan lagi serta berupaya menghapus kekhawatiran negara-negara Eropa, mengingat Jerman dulu telah mencoba menguasai Eropa dengan kejam. Jerman selalu memusatkan kepentingan dan kegiatan ekonominya untuk tujuan integrasi ekonomi ME dan di bentuknya suatu *European Monetary System* (EMS) atau Sistem Moneter Eropa, yang di rasa Jerman keduanya saling bergantung. Sebagai salah satu negara pelopor ME, Jerman melalui Kanselirnya Helmut Kohl pernah melakukan upaya khusus untuk mempromosikan suatu kerjasama antar negara-negara Eropa, yang berkonsentrasi pada usaha untuk membentuk *European Single Market* (Pasar Tunggal Eropa) dan ratifikasi Perjanjian Uni Eropa atau Perjanjian Maastricht karena dengan ini makanya suatu *United States of Europe* yang dicita-citakan akan lebih cepat terwujud. Jerman juga terus berupaya menjadi penyokong bagi negara-negara Eropa lainnya yang ingin masuk menjadi anggota ME ini . Untuk negara-negara Eropa Timur, Jerman telah berusaha memainkan kebijakannya di ME untuk lebih berperan serta dalam usaha deklarasi kerjasama ME dengan CMEA (Council for Mutual Economic Assistance) atau Dewan Bantuan Ekonomi Bersama milik negara-negara Eropa Timur tersebut sehingga mereka bisa diterima menjadi anggota ME. Selain itu, Jerman secara individual juga telah melakukan perjanjian perdagangan dengan negara-negara Eropa Timur seperti Hongaria, Cekoslowakia, Polandia, Uni Soviet, dan Rumania. Dengan adanya usaha-usaha ini, maka Jerman telah menjadi jembatan dalam upaya negara-negara Barat merangkul negara-negara bekas Komunis tersebut ke dalam suatu wadah yang lebih baik.

Perubahan politik yang terjadi di Uni Soviet mengakibatkan juga berubahnya konstelasi politik di negara-negara satelitnya di Eropa Timur tak terkecuali di Jerman Timur. Rezim Erich Honeker pun digantikan oleh Egon Krenz yang juga mempunyai pengaruh sangat besar dalam Jerman Timur, tetapi sangat mengejutkan justru Egon Krenz lah yang memerintahkan agar Tembok Berlin diruntuhkan pada tanggal 9 November 1989 sebagai jawaban demonstrasi-demonstrasi yang telah terjadi di negaranya. Gagasan reunifikasi yang sebelumnya mustahil kini menjadi bahan perbincangan, bukan hanya didalam negara Jerman Barat dan Jerman Timur saja tapi juga menjadi masalah internasional.

Maka dilakukanlah suatu pertemuan guna membahas penyatuan itu, yang antara lain diadakannya pertemuan "2 + 4" antar Menteri Luar Negeri Amerika, Uni Soviet, Inggris, Perancis dan kedua Jerman dalam rangka persiapan pertemuan "Open Sky" di Ottawa pada awal februari 1990. Pertemuan "2 + 4" in ditindaklanjuti lagi dengan dilakukannya pertemua di Bonn, Berlin, Paris, dan terakhir pada bulan September di Moskow mengenai aspek luar negeri Jerman. Sedang aspek dalam negeri Jerman diatur melalui dua perjanjian, yaitu perjanjian ekonomi keuangan dan sosial yang berlaku pada tanggal 1 juli 1990 dan penyatuan politik, pemerintahan dan hukum mulai berlaku tanggal 3 Oktober 1990 dan pada tanggal itulah Republik Federal Jerman resmi berdiri.

Dengan adanya reunifikasi ini, negara-negara di dunia khususnya di Eropa, perkembangan Jerman dapat ditujukan pada pembinaan hubungan yang harmonis dengan negara-negara Eropa agar tidak terjadi lagi peristiwa yang memalukan bangsa Jerman pada tahun 1930-an.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan dan uraian singkat di atas, maka perumusan masalah yang ditemukan di sini adalah : Bagaimana peluang dominasi Jerman pada bidang politik di Uni Eropa?

E. KERANGKA DASAR TEORI

Dengan melihat permasalahan yang ada, maka penulis berusaha menjawab dengan menggunakan :

Konsep Structural Power

Menurut konsep *Structural Power* dari *Susan Strange*⁶, konsep *Structural Power* merupakan kekuatan untuk membentuk dan menentukan struktur politik ekonomi terhadap negara-negara lain, termasuk didalamnya adalah institusi-institusi politik, pelaku kegiatan ekonomi dan ilmuwan dan juga orang-orang ahli yang mampu menggunakan kekuatan untuk menentukan segala sesuatu yang harus dilakukannya, antara lain yaitu untuk membentuk kerangka kerja yang berhubungan antara negara dengan masyarakat atau hubungan kerjasama antara negara dengan pengusaha.

Menurut Strange, kita akan memiliki kekuatan politik jika mampu ikut berperan dalam proses pengambilan kebijakan di suatu komunitas, institusi, atau pemerintah untuk kepentingan kita, seperti dalam penjelasannya :

“it's impossible to have political power without the power purchase, to command production to mobilize capital, and it is impossible to have economic power without the legal physical security that can be only be supplied political authority.”

⁶ Susan Strange, *State and Market : An Introduction to International Political Economy*, London, Pinter Publisher, 1998, hal. 24-25.

Strange menjelaskan bahwa tidak mungkin bagi suatu negara untuk memiliki kekuatan politik tanpa adanya kekuatan untuk membeli, untuk menguasai produk, serta kemampuan untuk menggerakkan modal. Tidaklah mungkin juga memiliki kekuatan ekonomi tanpa adanya sanksi terhadap kekuatan politik dan tanpa kekuatan hukum legal, yang nantinya hanya akan dipenuhi oleh kekuatan politik saja. Jadi pada dasarnya, kekuatan ekonomi dan politik pada suatu kegiatan tertentu itu dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, dan apabila terjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaannya, maka sudah barang tentu akan terjadi ketidakharmonisan dalam suatu peristiwa atau kejadian di dalam negeri maupun internasional.

Strange juga menambahkan bahwa *Structural Power* adalah kartu truf yang dimainkan antara sistem-sistem negara dan ekonomi di dalam kompetisi sistem dunia. *Structural Power* juga menjamin adanya suatu kekuatan untuk mencari jawaban bagaimana sesuatu itu harus dicapai, kekuatan untuk membentuk kerangka pemikiran didalamnya, dimana negara-negara saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan masyarakatnya atau berhubungan dengan kerjasama antar perusahaan-perusahaan besar.

Hubungan ini di gambarkan melalui kerangka yang terdiri dari empat struktur yang membangun sebuah bangunan pyramid, yaitu ;

1. *The Security Structure*

Keamanan, sepanjang kemungkinan suatu konflik membahayakan atau mengancam keamanan perseorangan, ia yang menawarkan perlindungan lain terhadap ancaman tersebut mampu untuk menggunakan kekuatan dalam masalah-masalah diluar keamanan lainnya.

Protector (aktor) yang dapat memberikan perlindungan secara otomatis memperoleh kekuasaan tertentu yang menyebabkan mereka mampu untuk menentukan bahwa membatasi suatu pilihan atau memilih yang disediakan untuk aktor lainnya (pengguna jasa). Dengan kekuatan *security structure* yang dimilikinya, protektor secara langsung akan memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu dari proses proteksi yang dilakukannya dalam setiap interaksi sosialnya. Dengan demikian, *security structure* adalah akibat yang tidak terelakkan dari proses siapa yang mendapatkan apa (*who gets what*) dalam kegiatan ekonomi.

Dari kontribusi protektor tersebut, aktor secara otomatis akan memberikan suatu *reward* berupa hak-hak istimewa sehingga protektor dapat menggunakan secara leluasa hak-hak istimewanya itu untuk kepentingannya di wilayah tersebut. Bersatunya Jerman menyebabkan kekuatan militer Jerman semakin menguat sehingga dapat dikatakan Jerman mempunyai kemampuan untuk melindungi keamanan suatu negara atau institusi atau seseorang yang mendapat ancaman dari pihak lain. Dari segi militer, Jerman sangat kompeten mengingat kemajuan pesat yang dicapai Jerman sehingga dapat digunakan untuk mengantisipasi ancaman dari luar terutama ke wilayah Eropa. Di Uni Eropa, Jerman juga menerapkan kebijakan keamanan bersama (CFSP). Selain itu Jerman juga berpartisipasi aktif dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) khususnya dalam kontribusi dana.

2. The Productional Structure

Siapa yang memutuskan apa yang diproduksi, oleh siapa, dengan apa, berarti dapat menggunakan kekuatan strukturalnya atas produksi untuk konsolidasi dan mempertahankan kekuatan sosial politiknya, membentuk konstitusi, mengatur

mendapatkan kredit yang nantinya akan mampu mengendalikan para pelaku ekonomi kapitalis dan sosialis. Kekuasaan untuk memberikan kredit ada pada pemerintah dan bank (yang akan banyak tergantung pada hubungan politik dan pengaturan antar keduanya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Jerman dapat dikatakan memenuhi syarat ini karena Jerman telah memberikan kontribusi dana kepada hampir ke seluruh negara-negara Eropa. Pada akhir 1989 sampai 1999, Jerman telah menyokong dana sebesar 77 trilyun untuk negara Eropa timur dan Tengah dan 150 trilyun untuk Rusia dan negara-negara independennya yang terletak di bekas teritori Uni Soviet. Jerman juga telah menyediakan dana kira-kira 1,2 trilyun di tahun 2000 bagi Albania, Macedonia, Romania, Bosnia Herzegovina, Kroasia dan Serbia Montenegro.

4. The Knowledge Structure

Ilmu pengetahuan adalah kekuatan, siapa saja yang dapat mengembangkannya atau mendapatkannya dan menolak akses orang lain terhadap suatu jenis ilmu pengetahuan yang diinginkan dan dilihat orang lain akan membentuk suatu jenis kekuatan structural khusus. Dalam bidang pengetahuan, Jerman sangat maju, ini didukung oleh adanya dukungan pemerintah dan swasta untuk membiayai riset dan penelitian yang diharapkan pada nantinya akan digunakan oleh negara-negara lain. Hasil memuaskan dari riset tersebut tentu akan memperkuat posisi Jerman di dunia dan di Uni Eropa pada khususnya. Apabila Jerman dapat menguasai dan mengembangkan keempat hal diatas, sudah barang tentu posisi Jerman dengan

... akan memiliki negara-negara lainnya di Eropa khususnya di Uni

F. HIPOTESA

Mengacu kepada empat faktor yang dikemukakan di atas dan mempertimbangkan bahwa Jerman telah memiliki kemampuan :

1. *Security Structure*, yaitu Jerman mampu memberikan perlindungan khususnya terhadap negara-negara Uni Eropa dari ancaman-ancaman dengan kemampuan militernya yang besar dan kuat,
2. *Productional Structure*, yaitu Jerman mampu memproduksi barang dan jasa yang kompeten khususnya di Uni Eropa sehingga negara-negara anggotanya dapat memperoleh beberapa kemudahan dengan mengonsumsi barang-barang dari Jerman yang tidak kalah kualitasnya dengan Amerika.
3. *Finance Structure*, yaitu Jerman mampu menciptakan kredit dan memberikan bantuan kepada negara-negara anggota Uni Eropa terutama Eropa Timur yang sedang dalam masa transisi. Diharapkan dengan bantuan ini dapat membantu untuk mengendalikan para pelaku ekonomi di Uni Eropa ,
4. *Knowledge Structure*, yaitu Jerman mampu mengembangkan ilmu pengetahuannya untuk kepentingannya dan dengan biaya riset sendiri tanpa campur tangan pihak lain yang nantinya akan digunakan untuk kelancaran proses perkembangan Uni Eropa itu sendiri,

Maka hipotesa yang dapat diambil adalah:

Bahwa reunifikasi Jerman membawa kembali Jerman menjadi kekuatan utama

G. JANGKAUAN PENULISAN

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis memberi batasan waktu antara awal tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 karena pada saat itulah Jerman memulai masa transisinya sebagai suatu Jerman bersatu yang lebih berkonsentrasi pada seputar pembangunan suprastruktur dan infrastruktur dalam negerinya dan sekitar wilayah Eropa melalui wadah Uni Eropa. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk mengutip kejadian-kejadian ataupun kasus dan juga berita yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya ataupun setelah tahun 2000, selama itu masih relevan dan berhubungan dengan penulisan ini.

H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan berbagai macam studi kepustakaan (*library research*). Pemanfaatan data-data didapatkan dari literatur-literatur, baik itu buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel-artikel, majalah, koran dan juga melalui internet.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan secara lebih rinci ke dalam sub-sub bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab-bab lainnya saling berhubungan erat satu sama lainnya, sehingga pada akhirnya nanti membentuk karya tulis yang runtut dan sistematis.

Adapun sistematika penulisan itu sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, berisikan langkah-langkah pembuatan skripsi sebagai pedoman langkah berikutnya. Langkah-langkah tersebut tersusun sebagai berikut :

Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penulisan, Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II: : Dipaparkan tentang politik Jerman sebelum dan sesudah Reunifikasi di Uni Eropa

BAB II : Uraian tentang usaha-usaha reunifikasi Jerman.

BAB IV : Berisi tentang analisa penulis berdasarkan teori yang digunakan yaitu tentang peluang Jerman dalam dominasinya di Uni Eropa.

Bab V : Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan bab.